



**RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) OPD  
TA. 2023**

**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**APRIL  
2022**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya penyusunan Rancangan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat untuk tahun 2023 ini telah selesai kami susun sesuai dengan harapan.

Prinsip yang diterapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dalam menyusun rencana kinerja dilakukan secara terkoordinir, berkesinambungan dan terintegrasi sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien transparan dan akuntabel.

Besar harapan pemerintah dan masyarakat agar mengoptimalkan peran dari masing-masing untuk mewujudkan pembangunan pada tahun 2023 yang telah disepakati secara konsensus dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dengan tetap berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat 2023-2026.

Akhirnya, semoga Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini dapat bermanfaat sebagai acuan agenda kerja tahunan.

Liwa, Maret 2022

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Drs. DAMAN NASIR.,M.P

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680701 198901 1 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	I
Daftar Isi .....	II
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..</b>	<b>6</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rensta OPD .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD .....	7
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi OPD...	8
2.4 Review terhadap rancangan awal OPD .....	9
2.5 Penelaahan Usulan Pogram dan Kegiatan Masyarakat....	10
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD.....</b>	<b>11</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasiona .....	12
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daearah .....	12
3.3 Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	15
<b>BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....</b>	<b>19</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>20</b>
LAMPIRAN I	
LAMPIRAN II	
LAMPIRAN III	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan amanat Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan Rencana Kerja OPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat mengacu pada rencana awal RKPD, Renstra dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada periode sebelumnya. Masalah yang dihadapi dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah.

### **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang tenaga Kerja
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
  5. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724);

9. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengolahan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
13. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
15. Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 tahun 2010;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 15 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2013;
18. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Tata Ruang wilayah kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat periode 2023 – 2026 dan sebagai bahan landasan pelaksanaan penyelenggaraan fungsi Perangkat Daerah dalam pencapaian kinerja dan target indicator Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2023.

Adapun tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Terwujudnya pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) secara umum melalui Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.

2. Mengukur Efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.
3. Mengukur tingkat capaian target kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isi-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
- 3.3. Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB IV PENUTUP**

##### **LAMPIRAN I**

##### **LAMPIRAN II**



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja ( Renja OPD ) Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2021 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan Sub Kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin setelah refocusing sebanyak 8 program, jumlah kegiatan refocusing sebanyak 13 kegiatan dan jumlah Sub kegiatan termasuk Sub kegiatan rutin setelah refocusing sebanyak 34 Sub-kegiatan. Alokasi dana tahun 2021 untuk Belanja Operasional setelah refocusing sebesar Rp 5.143.212.765,- terealisasi sebesar Rp 4.515.510.556,- atau 87.80 persen.

Dari seluruh Kegiatan dan Sub kegiatan terdapat sebanyak 1 Kegiatan serta 1 Sub kegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya belum mencapai 100 persen yaitu :

1. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan ) di Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia realisasi fisik/output sebesar 27 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena masih adanya pandemic *Covid-19* yang menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia di beberapa negara.

Rata-rata pencapaian indikator keluaran pada tahun 2021 adalah sebesar 100 %

Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2021 dengan capaian strategis sebagai berikut :

Tabel I. Pengukuran Sasaran Strategis TA. 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4
Meningkatnya Jumlah investasi di Lampung Barat	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rp. 90.000.000.000,-	Rp. 112.921.542.189,-
Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	IKM	B	B
Meningkatnya Kesempatan Kerja	TPAK	80,89 %	83,23%

Berdasarkan table diatas capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara umum tercapai 100 %.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu idealnya diperlukan adanya indikator kinerja tujuan yang pada hakekatnya merupakan outcome (manfaat) dari suatu kumpulan sasaran / program / kegiatan /sub kegiatan. Untuk keperluan ini dibutuhkan adanya Sistem Pengukuran Kinerja yang berlaku untuk satuan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat, terus berusaha mewujudkan kemudahan dalam pelayanan perizinan bagi dunia usaha, sehingga memberikan kesempatan yang luas dan transparan kepada masyarakat dalam mengurus segala macam jenis perizinan.

Perkembangan ekonomi mikro melalui tingkat penyebaran tempat

usaha di Kabupaten Lampung Barat relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator pertumbuhan ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi dalam mentaati kebijakan/regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui penetapan Peraturan Daerah dalam mendukung peningkatan iklim usaha dan ini harus diimbangi dengan kemudahan-kemudahan prosedur penerbitan izin.

### **2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ditentukan oleh sejauh mana pemerintah daerah dapat membangun daerahnya dan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik dan optimal kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kabupaten Lampung Barat dimana sebagian besar daerahnya adalah perbukitan / pegunungan dan kawasan maka ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah untuk dapat memunculkan ide/inovasi guna menarik para investor agar dapat ikut membantu mengembangkan daerah Kabupaten Lampung Barat, maka dirasa sangat diperlukan dukungan data investasi dan peluang investasi guna memetakan daerah-daerah yang dapat dilirik para investor untuk menanamkan modalnya.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

- a. Kondisi Geografis Kabupaten Lampung Barat yang rawan bencana dan sebagian besar merupakan kawasan konservasi
- b. Kurangnya minat investor untuk berinvestasi ke Lampung Barat
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melegalkan usaha / izin

Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

a. Tantangan

Tantangan merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat sedangkan Ancaman merupakan kondisi eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Tantangan dan ancaman tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- ▶ Penyelenggaraan *Online Single Submission* (OSS), perizinan berusaha berbasis risiko belum sepenuhnya berjalan maksimal
- ▶ Pemohon layanan belum seluruhnya memahami dan memanfaatkan teknologi IT;
- ▶ persaingan global semakin kencang;
- ▶ kurang terampilnya tenaga lokal daerah;

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal OPD**

Hasil review terhadap rancangan awal OPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Terdapat beberapa kegiatan/ sub kegiatan yang belum terdani di tahun 2022 diantaranya pengadaan cctv, mesin antrian guna mendukung pelayanan perizinan, maka pada Tahun 2023 sub kegiatan ini diajukan kembali.
- b. Adanya Permendagri 50 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenclatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
- c. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- d. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi

Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pada kegiatan musrenbang tahun 2023 terdapat usulan dari Kecamatan Batu Ketulis Pekon Bakhu yaitu Layanan Perizinan Mobile ( Layanan PM ) yaitu banyaknya masyarakat yang belum memiliki IMB/PBG ( Layanan perizinan dan non perizinan dapat diakses pada aplikasi OSS.go.id dan simbg.go.id untuk layanan IMB/PBG)

## BAB III

### TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

##### A. Visi dan Misi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

###### 6 key performance indicator (KPI) BKPM untuk meningkatkan investasi



Eksekusi realisasi investasi besar



Perbaikan peringkat Kemudahan Berusaha (*Doing Business*)



Mendorong investasi besar untuk bermitra dengan pengusaha nasional khususnya UMKM di daerah proyek



Penyebaran investasi berkualitas



Promosi investasi terfokus berdasarkan sektor dan negara



Mendorong peningkatan investasi dalam negeri/PMDN khususnya UMKM

Sumber: <https://www.bkpm.go.id>

##### B. Peta Arah Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

1. Fokus dalam jangka pendek adalah meningkatkan efisiensi investasi di Indonesia. Hal ini mencakup optimalisasi sumber daya alam sebagai katalisator yang dapat menciptakan momentum yang diperlukan untuk melaksanakan program-program menuju pembangunan ekonomi yang lebih besar.
2. Penyaluran investasi ke arah kebutuhan infrastruktur keras maupun lunak. Yang dimaksud dengan infrastruktur keras meliputi jalan raya, bandara, pelabuhan dan kapasitas pembangkit listrik, sedangkan infrastruktur lunak mencakup antara lain pelayanan kesehatan dan pendidikan.

3. Membangun landasan untuk industrialisasi. Hal ini menuntut adanya investasi di bidang pendidikan secara terus menerus untuk menciptakan angkatan kerja yang berpendidikan dan berkemampuan tinggi. Tuntutan selanjutnya adalah penghapusan ketidakpastian dalam kebijakan, termasuk pelaksanaan prakarsa PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan SPIPISE atau NSWi (*National Single Window for Investment*) secara maksimum yang dirancang untuk menanggulangi masalah ini. Ketentuan hukum tentang insentif fiskal dan non-fiskal juga perlu diperhatikan untuk menunjang upaya industrialisasi skala besar ini.
4. Mendukung pembentukan ekonomi berbasis pengetahuan dengan mengembangkan lebih lanjut angkatan kerja berpendidikan yang dapat bersaing secara global. Pada tahap ini, BKPM akan berupaya untuk terus menguatkan perannya sebagai advokat kebijakan investasi dan penghubung antara investor dengan pemerintah, baik untuk modal asing maupun domestik.

Sumber: <https://www.bkpm.go.id>

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (Empat) Tahunan sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Tujuan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik sektor Perizinan Penanaman modal;

Sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan;

Table, Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana table berikut :



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah		Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rp. 95 Milyar	Rp. 99,75 M	Rp. 104,64 M	Rp. 109,87 M
		Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rp. 95 Milyar	Rp. 99,75 M	Rp. 104,64 M	Rp. 109,87 M
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik sektor Perizinan Penanaman modal	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	82	85	88,5
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	82	85	88,5

### 3.3 Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

#### **I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA dengan kegiatan :**

##### **1. Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- e. Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- f. Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Sub. Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### **2. Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- d. Sub. Keg. Penyusunan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

### **3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- a. Sub. Keg. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- b. Sub. Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

### **4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Sub. Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - c. Sub. Keg. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
  - d. Sub. Keg. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - e. Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub. Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

### **5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Sub. Kegiatan Jasa Surat Menyurat
- b. Sub. Kegiatan Jasa Kom, Sumb. Daya Air & Listrik
- c. Sub. Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor

### **5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
- b. Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Sub. Keg. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya

- d. Sub. Keg. Pemeiharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau bangunan lainnya.

## **II. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**

- 1. **Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**
  - a. Sub. Keg. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
  - b. Sub. Keg. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

## **III. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

- 1. **Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**
  - a. Sub. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
  - b. Sub. Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
  - c. Sub. Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

## **IV. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

- 1. **Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**
  - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- c. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

## **V. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**

- 1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
  - a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

## **VI. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**

- 1. Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**

Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan tahun anggaran 2023  
terlampir

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat, maka disusunlah Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah untuk tahun 2023.

Dengan adanya Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat diharapkan dapat menjadi acuan dalam rencana penetapan kebijakan Anggaran Belanja Daerah Lampung Barat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 diharapkan dapat mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Liwa,       Maret 2022  
KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Drs. DAMAN NASIR.,M.P

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680701 198901 1002





**LAMPIRAN I**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022**  
**Kabupaten Lampung Barat**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat**

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Subkegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan tahun 2018 s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program, Kegiatan dan Subkegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Subkegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
02	07				TENAGA KERJA									
02	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang bekerja	75%	60%	70%	70%	100%			
02	07	03	2,01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pelatihan yang dilaksanakan	5 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%			
02	07	03	2,01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan	340 Orang	180 Orang	35 Orang	35 Orang	100%			
02	07	03	2,01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pelatihan Kerja yang Tersedia	5 Jenis	5 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%			
02	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar dan Mendapatkan Pelatihan	40%	26%	35%	35%	100%			
02	07	04	2,03		Pengolahan Informasi Pasar Kerja	Jumlah media penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	4 Media	4 Media	4 Media	4 Media	100%			
02	07	04	2,03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Informasi Pasar Kerja yang dipublikasikan	180 Lowongan Pekerja	144 Lowongan Pekerjaan	36 Lowongan Pekerjaan	36 Lowongan Kerja	100%			
02	07	04	2,04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Migran Indonesia asal Lampung Barat yang mendapatkan pelayanan	120 Rekom IDCMI	89 Rekom IDCMI	30 Rekom IDCMI	8 Rekom IDCMI	27%			



02	18	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
02	18	01	2,02	02	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
02	18	01	2,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah sub organisasi yang dilaksanakan pengadministrasian umumnya</b>	<b>4 Sub Organisasi</b>	<b>4 Sub Organisasi</b>	<b>4 Sub Organisasi</b>	<b>4 Sub Organisasi</b>	<b>100%</b>	<b>4 Sub Organisasi</b>	<b>4 Sub Organisasi</b>	<b>100%</b>
02	18	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yg disediakan	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100%	7 Jenis	10 Jenis	100%
02	18	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan jenis penggandaan	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	100%	8 Jenis	8 Jenis	100%
02	18	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU (Surat Kabar Harian Umum)	5 SKHU	4 SKHU	5 SKHU	5 SKHU	100%	5 SKHU	5 SKHU	100%
02	18	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu	60 Kali	36 Kali	12 Kali	12 Kali	100%	12 Kali	60 Kali	100%
02	18	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	120 Kali	72 Kali	12 Kali	12 Kali	100%	29 Kali	113 Kali	94%
02	18	01	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</b>	<b>1 Jenis</b>	<b>1 Jenis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1 Jenis</b>	<b>1 Jenis</b>	<b>100%</b>
02	18	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	0	0	0	0	0%	1 Unit	1 Unit	100%
02	18	01	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Sub Bagian</b>	<b>4 Sub Bagian</b>	<b>4 Sub Bagian</b>	<b>4 Sub Bagian</b>	<b>100%</b>	<b>4 Sub Bagian</b>	<b>4 Sub Bagian</b>	<b>100%</b>
02	18	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	5635 Surat	4551 Surat	1027 Surat	2210 Surat	215%	1127 Surat	5635 Surat	100%
02	18	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening/ID Pelanggan	5 Rekening	4 Rekening	4 Rekening	4 Rekening	100%	4 Rekening	4 Rekening	80%
02	18	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa	4 Sub Organisasi	4 Sub Organisasi	4 Sub Organisasi	4 Sub Organisasi	100%	4 Sub Organisasi	4 Sub Organisasi	100%
02	18	01	2,09		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>100%</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>100%</b>
02	18	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraannya	11 Kendaraan	11 Kendaraan	11 Kendaraan	11 Kendaraan	100%		11 Kendaraan	100%
02	18	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaannya	15 Kendaraan	11 Kendaraan	11 Kendaraan	11 Kendaraan	100%	11 Kendaraan	15 Kendaraan	100%

02	18	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	100%	8 Unit	10 Unit	100%
02	18	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 Gedung	2 Gedung	2 Gedung	2 Gedung	100%	2 Gedung	2 Gedung	100%
02	18	01	2,09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 Gedung	2 Gedung	2 Gedung	2 Gedung	100%		2 Gedung	100%
02	18	03			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah unit usaha baru	50 Unit Usaha Baru	50 Unit Usaha Baru	50 Unit Usaha Baru	240 Unit Usaha Baru	480%	50 Unit Usaha Baru	50 Unit Usaha Baru	100%
02	18	03	2,01		<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Promosi Penanaman Modal	6 Event	2 Event	2 Event	2 Event	100%	2 Event	6 Event	100%
02	18	03	2,01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	6 Event	2 Event	2 Event	2 Event	100%	2 Event	6 Event	100%
02	18	04			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai	90%	80%	85%	85%	100%	90%	90%	100%
02	18	04	2,01		<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah Perizinan dan non perizinan yang terbit	2000 Izin	1200 Izin	400 Izin	508 Izin	127%	400 Izin	2000 Izin	100%
02	18	04	2,01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pemohon perizinan yang dilayani	2000 Orang	1200 Orang	400 Orang	521 Orang	130%	400 Orang	2000 Orang	100%
02	18	04	2,01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah survei perizinan	400 Survie Perizinan	100 Survei Perizinan	51 Survei Perizinan	89 Survei Perizinan	175%	70 Survei Perizinan	400 Survie Perizinan	55%
02	18	04	2,01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat	5 Jenis	3 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	4 Jenis	80%
02	18	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan	75%	70%	75%	75%	100%	75%	75%	100%
02	18	05	2,01		<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pelaku usaha Pelaksanaan yg melakukan pelaporan Penanaman Modal	9 Pelaku Usaha	9 Pelaku Usaha	9 Pelaku Usaha	9 Pelaku Usaha	100%	9 Pelaku Usaha	9 Pelaku Usaha	100%
02	18	05	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan	9 Profil Perusahaan	3 Profil Perusahaan	9 Profil Perusahaan	9 Profil Usaha	100%	9 Profil Usaha	9 Profil Perusahaan	100%

02	18	05	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Peserta Pelaksanaan Pembinaan (Bimtek) Penanaman Modal	360 Orang	0	234 Orang	234 Orang	100%	234 Orang	468	130%
02	18	05	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal	40 Laporan	24 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	100%	9 Laporan	42	105%
02	18	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah Penanaman Modal di Kab. Lampung Barat	15 Sektor Usaha	15 Sektor Usaha	15 Sektor Usaha	15 Sektor Usaha	100%	15 Sektor Usaha	15 Sektor Usaha	100%
02	18	06	2,01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data Investasi dan Realisasi Perizinan	5 Buku	3 Buku	1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	5 Buku	100%
02	18	06	2,01	01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Data Investasi dan Realisasi Perizinan berusaha	48 Eksemplar	48 Eksemplar	45 Eksemplar	45 Eksemplar	100%	45 Eksemplar	48 Eksemplar	100%

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

**LAMPIRAN II**  
**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Kabupaten Lampung Barat**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat**

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target 2023	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
1					2		6	7	10	11	12	13
02					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
02	18				PENANAMAN MODAL		5.888.142.800			7.262.553.947		DPMPTSP
02	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,80	3.057.395.800	Aparatur	79,00	4.129.890.847	DPMPTSP
02	18	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	23.532.400	Aparatur	11 Dokumen	33.886.656	DPMPTSP
						Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	5 Dokumen			5 Dokumen		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan			12 Laporan		
02	18	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	3.268.000	Aparatur	4 Dokumen	4.705.920	DPMPTSP
02	18	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.848.100	Aparatur	1 Dokumen	2.661.264	DPMPTSP
02	18	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.811.000	Aparatur	1 Dokumen	2.607.840	DPMPTSP
02	18	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.627.300	Aparatur	1 Dokumen	2.343.312	DPMPTSP
02	18	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.581.000	Aparatur	1 Dokumen	2.276.640	DPMPTSP

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target 2023	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
02	18	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1.969.600	Aparatur	4 Laporan	2.836.224	DPMPSTP
02	18	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	11.427.400	Aparatur	10 Laporan	16.455.456	DPMPSTP
02	18	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang	2.514.810.500	Aparatur	24 Orang	3.325.085.636	DPMPSTP
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	17 Laporan			1 Laporan		
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen			1 Dokumen		
02	18	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang	2.505.810.500	Aparatur	27 Orang	3.313.934.386	DPMPSTP
02	18	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.000	Aparatur	1 Laporan	3.306.250	DPMPSTP
02	18	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	4.500.000	Aparatur	17 Laporan	5.200.000	DPMPSTP
02	18	01	2,02	02	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.000.000	Aparatur	1 Dokumen	2.645.000	DPMPSTP
02	18	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	9.200.000	Aparatur	1 Dokumen	10.200.000	DPMPSTP
02	18	01	2,03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	9.200.000	Aparatur	1 Dokumen	10.200.000	DPMPSTP



KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target 2023	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
02	18	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 Dokumen	22.199.900	Aparatur	1 Dokumen	20.700.000	DPMPTSP
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang			4 Orang		
02	18	01	2,05	5	Monitoring dan Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 Dokumen	4.199.900	Aparatur	1 Dokumen	5.000.000	DPMPTSP
02	18	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	18.000.000	Aparatur	4 Orang	20.700.000	DPMPTSP
02	18	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	135.588.000	Aparatur	2 Paket	181.847.275	DPMPTSP
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0			3 Paket		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0			3 Paket		
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen			5 Dokumen		
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan			12 Laporan		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			4 Laporan		
02	18	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.054.000	Aparatur	2 Paket	2.689.965	DPMPTSP
02	18	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Aparatur	3 Paket	1.495.000	DPMPTSP
02	18	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0	Aparatur	3 Paket	1.725.000	DPMPTSP

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target 2023	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
02	18	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	22.905.000	Aparatur	2 Paket	39.399.750	DPMPTSP
02	18	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	4.860.000	Aparatur	5 Dokumen	6.427.350	DPMPTSP
02	18	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.076.000	Aparatur	12 Laporan	6.713.010	DPMPTSP
02	18	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.693.000	Aparatur	4 Laporan	123.397.200	DPMPTSP
02	18	01	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	52.200.000	Aparatur	11 Unit	69.700.000	DPMPTSP
						Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	6 Unit			4 Unit		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	0			1 Unit		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0			1 Unit		
02	18	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	Aparatur	11 Unit	16.600.000	DPMPTSP
02	18	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	6 Unit	52.200.000	Aparatur	4 Unit	23.100.000	DPMPTSP
02	18	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	Aparatur	1 Unit	20.000.000	DPMPTSP
02	18	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	Aparatur	1 Unit	10.000.000	DPMPTSP
02	18	01	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	158.125.000	Aparatur	4 Laporan	234.109.065	DPMPTSP
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			4 Laporan		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			4 Laporan		
02	18	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.385.000	Aparatur	4 Laporan	1.831.663	DPMPTSP
02	18	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	21.730.000	Aparatur	4 Laporan	33.398.300	DPMPTSP

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target 2023	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif		
02	18	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	135.010.000	Aparatur	4 Laporan	198.879.103	DPMPTSP	
02	18	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	141.740.000	Aparatur	11 Unit	264.562.215	DPMPTSP	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit				9 Unit		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit				2 Unit		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit				2 Unit		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit				1 Unit		
02	18	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	101.860.000	Aparatur	11 Unit	166.069.200	DPMPTSP	
02	18	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	10.180.000	Aparatur	9 Unit	15.693.015	DPMPTSP	
02	18	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	29.700.000	Aparatur	2 Unit	74.750.000	DPMPTSP	
02	18	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	Aparatur	2 Unit	2.300.000	DPMPTSP	
02	18	01	2,09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Aparatur	1 Unit	5.750.000	DPMPTSP	
02	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan dan atau Peraturan Perundang-undangan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	20%	300.000.000	Invsetor	20%	65.000.000	DPMPTSP	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target 2023	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
02	18	02	2,01		Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Kepala daerah/ Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	300.000.000	Invsetor	0	65.000.000	DPMPTSP
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	0			1 Kegiatan usaha		
02	18	02	2,01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Kepala daerah/ Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	300.000.000	Invsetor	0	0	DPMPTSP
02	18	02	2,01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	0	0		1 Kegiatan usaha	65.000.000	DPMPTSP
02	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Minat Investasi	10%	1.550.000.000	Invsetor	10%	2.080.000.000	DPMPTSP
02	18	03	2,01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	0	1.550.000.000	Invsetor	1 Dokumen	2.080.000.000	DPMPTSP
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen			1 Dokumen		
02	18	03	2,01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	0	0		1 Dokumen	100.000.000	DPMPTSP
02	18	03	2,01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1.550.000.000	Invsetor dan Masyarakat	1 Dokumen	1.980.000.000	DPMPTSP
02	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan	100%	584.625.000	Pelaku Usaha dan Masyarakat	100%	533.066.400	DPMPTSP

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target 2023	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
02	18	04	2,01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	400 Pelaku Usaha	584.625.000	Pelaku Usaha dan Masyarakat	425 Pelaku Usaha	533.066.400	DPMPTSP
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	60 Kegiatan Usaha			65 Kegiatan Usaha		
						Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20 Orang			16 Orang		
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	0			1 Kegiatan Usaha		
02	18	04	2,01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	400 Pelaku Usaha	485.090.000	Pelaku Usaha dan Masyarakat	425 Pelaku Usaha	398.599.900	DPMPTSP
02	18	04	2,01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	60 Kegiatan Usaha	73.585.000	Pelaku Usaha dan Masyarakat	65 Kegiatan Usaha	80.921.500	DPMPTSP
02	18	04	2,01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20 Orang	25.950.000	Pelaku Usaha dan Masyarakat	16 Orang	28.545.000	DPMPTSP
02	18	04	2,01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	0			1 Kegiatan Usaha	25.000.000	DPMPTSP
02	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan	75%	326.122.000	Pelaku Usaha	85%	380.596.700	DPMPTSP

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target 2023	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif		
02	18	05	2,01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	8 Kegiatan Usaha	326.122.000	Pelaku Usaha	9 Kegiatan Usaha	380.596.700	DPMPTSP	
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	210 Pelaku Usaha			210 Pelaku Usaha			
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	13 Kegiatan Usaha			14 Kegiatan Usaha			
02	18	05	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	8 Kegiatan Usaha	48.114.000	Pelaku Usaha	9 Kegiatan Usaha	53.130.000	DPMPTSP	
02	18	05	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	210 Pelaku Usaha	216.878.000	Pelaku Usaha	210 Pelaku Usaha	238.504.200	DPMPTSP	
02	18	05	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	13 Kegiatan Usaha	61.130.000	Pelaku Usaha	14 Kegiatan Usaha	88.962.500	DPMPTSP	
02	18	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase layanan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dapat diakses dan dipublikasikan melalui media pblikasiwebsite DPMPTSP</b>	<b>100%</b>	<b>70.000.000</b>	<b>Investor dan Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>74.000.000</b>	<b>DPMPTSP</b>	
02	18	06	2,01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	70.000.000	Investor dan Masyarakat	1 Dokumen	74.000.000	DPMPTSP	
02	18	06	2,01	01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	70.000.000	Investor dan Masyarakat	1 Dokumen	74.000.000	DPMPTSP	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lampung Barat  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.15.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.15.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
2																			
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					5,888,521,800									7,076,483,946
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3,055,774,800									4,133,820,846
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					25,690,400									33,886,656
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	78,80 %	11 Dokumen	79 Point	4,346,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	78,80 %		4,705,920
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	78,80 %	1 Dokumen	79 Point	1,848,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	78,80 %		2,661,264
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	78,80 %	1 Dokumen	79 Point	1,811,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	78,80 %		2,607,840
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	78,80 %	1 Dokumen	79 Point	1,627,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	78,80 %		2,343,312
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	78,80 %	1 Dokumen	79 Point	1,581,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	78,80 %		2,276,640
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	78,80 %	1 Laporan	79 Point	1,969,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	78,80 %		2,836,224
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	78,80 %	12 Laporan	79 Point	12,507,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	78,80 %		16,455,456
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2,514,125,500									3,325,085,636

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lampung Barat  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.15.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.15.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	78,80 %	24 Orang/bulan	77 Point	2,505,810,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	78,80 %	3,313,934,386
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	78,80 %	1 Laporan	79 Point	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	78,80 %	3,306,250
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	78,80 %	17 Laporan	79 Point	3,815,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	78,80 %	5,200,000
2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	78,80 %	1 Dokumen	79 Point	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	78,80 %	2,645,000
2.18.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>								<b>8,921,000</b>					<b>10,200,000</b>
2.18.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	78,80 %	1 Dokumen	79 Point	8,921,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	78,80 %	10,200,000
2.18.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>24,199,900</b>					<b>25,700,000</b>
2.18.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	78,80 %	1 Dokumen	79 Point	4,199,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	78,80 %	5,000,000
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		78,80 %	4 Orang	79 Point	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	78,80 %	20,700,000
2.18.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>136,068,000</b>					<b>178,627,275</b>
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	78,80 %	2 Paket	79 Point	2,054,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	78,80 %	2,689,965



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lampung Barat  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.15.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.15.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	78,80 %	2 Paket	79 Point	22,905,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	78,80 %	39,399,750
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	78,80 %	5 Dokumen	79 Point	4,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	78,80 %	6,427,350
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	78,80 %	12 Laporan	79 Point	5,316,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	78,80 %	6,713,010
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		78,80 %	12 Laporan	79 Point	100,933,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	78,80 %	123,397,200
2	18	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>37,700,000</b>						<b>69,700,000</b>
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	78,80 %	5 Unit	79 Point	37,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	78,80 %	69,700,000
2	18	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>159,195,000</b>						<b>234,109,064</b>
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	78,80 %	12 Laporan	79 Point	1,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	78,80 %	1,831,662
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	78,80 %	12 Laporan	79 Point	22,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	78,80 %	33,398,300
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	78,80 %	12 Laporan	79 Point	135,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	78,80 %	198,879,102
2	18	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>149,875,000</b>						<b>256,512,215</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lampung Barat  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.15.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.15.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPSTP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	78,80 %	11 Unit	79 Point	106,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPSTP	78,80 %	166,069,200
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPSTP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	78,80 %	13 Unit	79 Point	10,237,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPSTP	78,80 %	15,693,015
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPSTP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	78,80 %	1 Unit	79 Point	32,778,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPSTP	78,80 %	74,750,000
2	18	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>								300,000,000				0
2	18	02	2.01		<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>								300,000,000				0
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase kebijakan dan atau Peraturan Perundang-undangan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	20 %	1 Dokumen	95 Miliar	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kebijakan dan atau Peraturan Perundang-undangan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	20 %	0
2	18	03			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>								1,550,000,000				1,980,000,000
2	18	03	2.01		<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>								1,550,000,000				1,980,000,000
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Minat Investasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Investasi PMDN/PMA		10 %	2 Dokumen	95 Miliar	1,550,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Minat Investasi	10 %	1,980,000,000
2	18	04			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>								586,625,000				508,066,400
2	18	04	2.01		<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>								586,625,000				508,066,400
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	100,00 %	400 Pelaku Usaha	79 Point	487,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan	100,00 %	398,599,900

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lampung Barat  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.15.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.15.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	60 Kegiatan Usaha	79 Point	73,585,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan	100,00 %	80,921,500
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	100,00 %	20 Orang	79 Point	25,950,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan	100,00 %	28,545,000
2	18	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>							326,122,000			380,596,700		
2	18	05	2.01		<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>							326,122,000			380,596,700		
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan pada tahun N-1	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,00 %	8 Kegiatan Usaha.	95 Miliar	48,114,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan pada tahun N-1	75,00 %	53,130,000
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan pada tahun N-1	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,00 %	210 Pelaku Usaha	95 Miliar	216,878,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan pada tahun N-1	75,00 %	238,504,200
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan pada tahun N-1	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,00 %	13 Kegiatan Usaha	95 Miliar	61,130,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan pada tahun N-1	75,00 %	88,962,500
2	18	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>							70,000,000			74,000,000		
2	18	06	2.01		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>							70,000,000			74,000,000		
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Layanan Data dan Informasi Perizinan dan non perizinan yang dapat diakses dan dipublikasikan melalui media publikasi website DPMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	100 %	1 Dokumen	95 Miliar	70,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Data dan Informasi Perizinan dan non perizinan yang dapat diakses dan dipublikasikan melalui media publikasi website DPMPTSP	100 %	74,000,000
<b>TOTAL</b>												<b>5,888,521,800</b>			<b>7,076,483,946</b>		